

ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEDIRI

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Desy Mediana Handayani

155020100111040



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEDIRI

Yang disusun oleh :

Nama : Desy Mediana Handayani

NIM : 155020100111040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 September 2019

Malang, 20 September 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME

NIP. 196912101997031003

ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KEDIRI

Desy Mediana Handayani, Wildan Syafitri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: desymedianah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yang menjelaskan hubungan antara tingkat kemiskinan yang menggunakan data dikotomi dengan variabel Dana Desa, penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Hasil uji statistik menunjukkan variabel Dana Desa dan variabel PADes berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Arah pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan adalah positif, sedangkan arah pengaruh PADes adalah negatif. Sedangkan variabel penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan di bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Kata kunci: Dana Desa, PADes, Kemiskinan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the use of Village Funds in the field of Village Development and the field of Village Community Empowerment in Kediri Regency. This study uses logistic regression analysis that explains the relationship between poverty levels using dichotomous data with the variable Village Funds, the use of Village Funds in the field of Village Development and Village Community Empowerment and on Original Village Revenues (PADes). Statistical test results show that the Village Fund variable and the PADes variable significantly influence poverty levels in Kediri Regency. The direction of influence of the Village Fund on poverty levels is positive, while the direction of the influence of PADes is negative. While the variable use of Village Funds in the field of Village Development and in the field of Community Empowerment did not significantly influence poverty in Kediri Regency.

Keyword : Village Fund, PADes, Poverty

A. PENDAHULUAN

Hambatan pada pembangunan ekonomi suatu negara disebabkan sekaligus sebagai akibat dari kemiskinan. Arti kemiskinan lebih dari kurangnya pendapatan dan sumber daya untuk memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan. Manifestasinya termasuk kelaparan dan kekurangan gizi, akses terbatas ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, diskriminasi sosial dan pengucilan serta kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini seperti yang telah ditunjukkan pada World Development Report 2000/2001 dalam Liu, Liu, & Zhou (2017), yang menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang mencakup kurangnya kesempatan, kurangnya pemberdayaan, kurangnya keamanan, dan kekurangan gizi dan kesehatan yang buruk. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menentukan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) sebagai agenda dunia dalam pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi dimana pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama pada Sustainable

Development Goals (SDG) periode 2015-2030. Hal tersebut dengan harapan dapat mengentaskan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Lingkaran perangkap kemiskinan pada intinya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di suatu negara sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan jika dilihat dari sisi penawaran (supply) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, kemudian menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari sisi permintaan (demand), di negara-negara miskin kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan penduduk Indonesia di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Per Maret 2018 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 9,82 persen atau sebesar 25,95 juta orang. Tingkat penduduk miskin di Indonesia yang berada di bawah 10 persen merupakan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Angka ini juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 633,2 ribu orang apabila dibandingkan dengan kondisi September 2017 lalu yang sebesar 26,58 juta orang atau sebesar 10,12 persen. Namun, meski mengalami penurunan disparitas yang signifikan antara persentase penduduk miskin di kota dan di desa masih terlihat. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan per Maret 2018 menunjukkan angka sebesar 10,14 juta orang atau 7,02 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 15,81 juta orang atau 13,20 persen.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah pengentasan kemiskinan bersamaan dengan penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro dalam Permana, 2012). Menurut Rustam (dalam Zuhdiyati & David, 2015), salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada. Kunci utama pertumbuhan ekonomi di China menurut hasil penelitian dari Lin (2012) adalah melalui reformasi fiskal dan reformasi pedesaan. Desentralisasi fiskal yang ada di China telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka pengentasan kemiskinan, sejalan pula dengan harapan tercapainya tujuan SDG, Pemerintah Kabinet Kerja menetapkan sembilan prioritas pembangunan Indonesia yang sering disebut dengan Nawa Cita. Pada Prioritas ketiga pembangunan Indonesia tersebut berfokus pada pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memandirikan daerah, hal ini mengingat persentase kemiskinan lebih banyak ada pada masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Kemudian ditambah dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat Desa tidak hanya menjadi obyek pembangunan namun kini juga lebih berperan sebagai subyek pembangunan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian

dan keadilan sosial dialokasikan untuk mendanai pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak perekonomian dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan perekonomian daerah. Menurut Tim LPEM-PSEKP-PSP dalam Wibowo (2014) salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang cukup efektif adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar yang penting seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, sanitasi dan penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan kondisi pembangunan daerah maupun nasional. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata (Atmaja dan Mahalli, 2015).

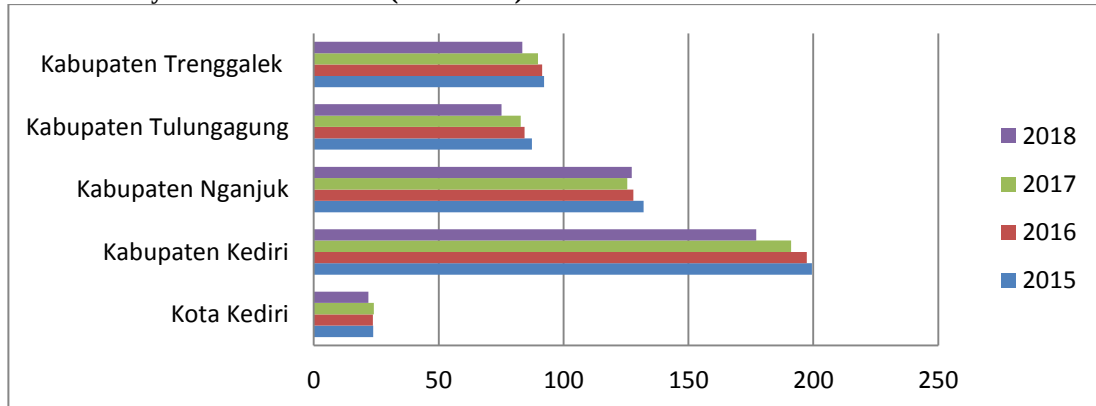
Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Pemberdayaan telah menempati posisi sentral dalam wacana prioritas pembangunan sejak awal 1990-an. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan memberikan peran penting bagi perkembangan masyarakat dan pemberdayaan keluarga (Hughes, 2015). Hughes juga menyimpulkan bahwa masalah pedesaan yang sudah berlangsung tidak dapat cepat dihilangkan, namun melalui strategi pemberdayaan dapat memberikan satu dasar untuk merancang program, layanan, dan kebijakan yang berpotensi bermanfaat. Kemudian Wahyono, et al. (dalam Nugroho dan Surjono, 2008) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan peran kepada individu masyarakat bukan sebagai objek namun sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka sendiri.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dana Desa dalam penggunaannya dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa.

Dari tahun 2012 hingga tahun 2017, baik Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri menunjukkan trend penurunan jumlah kemiskinan yang lambat. Kemudian berdasarkan PDRB menurut harga konstan, keadaan ekonomi di Kota Kediri adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan Kediri dan sekitarnya lainnya. Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga

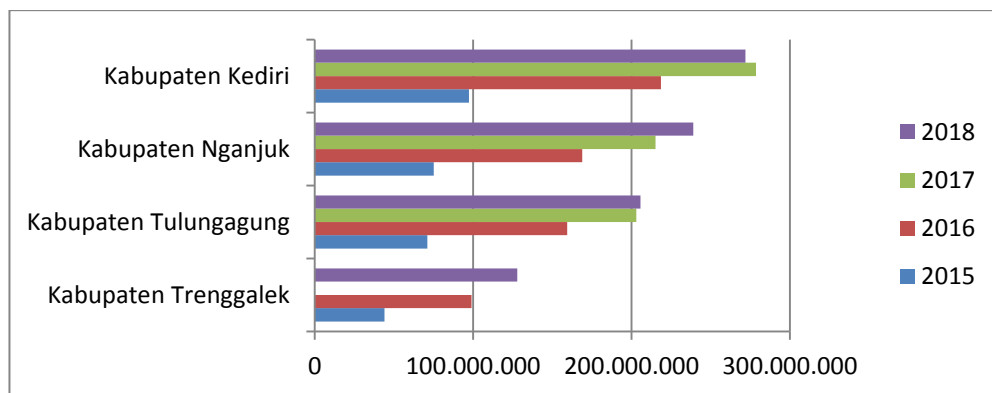
Kabupaten Kediri merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan juga memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di WP Kediri dan sekitarnya. Begitu pula dengan bantuan Dana Desa yang diberikan kepada Kabupaten Kediri juga lebih banyak daripada daerah lainnya dari tahun ke tahun.

Gambar 1 :Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya Tahun 2015-2018 (Ribuan Jiwa)



Sumber : BPS, diolah 2019

Gambar 2 : Perbandingan Rincian Dana Desa di Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya Tahun 2015-2018 (Rupiah)



Sumber :Dirjen Perimbangan Keuangan, diolah (2019)

Selain prioritas penggunaannya pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dana Desa sebenarnya dapat digunakan untuk dua bidang lainnya yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Namun realisasi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri masih tetap didominasi untuk bidang Pembangunan Desa dibanding dengan bidang lainnya. Penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa sekitar 96%, di tahun 2016 sekitar 92%, tahun 2017 sekitar 86% sedangkan di tahun 2018 sekitar 79%.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan menjadi alasan penulis untuk mengetahui pengaruh penggunaan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Teori Kemiskinan Marxis (Manjoro, 2017) menjelaskan bahwa kemiskinan berasal dari akibat dari situasi yang dialami individu miskin itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat miskin merupakan korban

dari keadaan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang kritis, diantaranya adalah faktor sistem produksi. Karl Marx menunjukkan bahwa praktik wirausaha dari pemilik alat produksi (kapitalis) beralih dari tenaga kerja ke alat produksi intensif modal untuk meningkatkan produksi dan laba sehingga menyebabkan pengangguran besar-besaran. Pengangguran tersebut apabila gagal mengubah profesi akan berakhir di rumah sebagai orang miskin. Sehingga, penghematan beban produksi yang berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin dalam ekonomi dan dalam jangka panjang akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinannya, teori ini memberikan rekomendasi melalui meningkatkan struktur produksi dan peningkatan pendidikan dan pelatihan teknologi agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan industri

Ragnar Nurkse (dalam Jhingan, 1992) menjelaskan penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*viscious circle of poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Pada intinya lingkaran setan berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah, sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian

Hambatan yang paling erat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal yang bersumber seperti yang dijelaskan pada lingkaran kemiskinan sebelumnya. Masyarakat pada negara yang terjebak pada lingkaran kemiskinan kebanyakan buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal dan metode produksi yang usang sehingga produktivitas marginalnya menjadi sangat rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah lalu tabungan pun rendah, investasi rendah, dan tingkat pembentukan modal rendah pula. Salah satu jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut adalah dengan menaikkan investasi dengan cara meningkatkan pembentukan modal. Pembentukan modal dapat dilakukan melalui investasi modal fisik dan investasi modal manusia. Investasi modal fisik adalah semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru atau meningkatkan stok barang modal (Mankiw, 2000). Sedangkan investasi modal manusia (*human capital investment*) dapat berupa nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan..

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*) (Khusaini, 2006:76)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sesuai dengan undang-undang tersebut daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama

Dana Desa

Dana Desa dialokasikan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Dana Desa berasal dari dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD. Sesuai dengan APBN TA 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash For Work) dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum Dana Desa dapat digunakan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah, bidang Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menampilkan data dalam bentuk angka daripada naratif serta mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Pembahasan akan mengacu pada hasil pengolahan data yang diperoleh, kemudian data yang ditemukan akan dipaparkan secara sistematis dan faktual sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data kuantitatif. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan dipublikasi oleh instansi tertentu. Sedangkan data kuantitatif adalah data-data berupa angka atau dalam bentuk numerik. Sementara bentuk data yang digunakan berupa data lintas ruang (cross section) yang merupakan data-data yang dikumpulkan secara serentak pada waktu dan periode tertentu secara bersamaan dan menggambarkan keadaan pada periode tertentu.

Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 1 variabel terikat (dependent) yaitu variabel tingkat kemiskinan (Y). Dan 4 variabel bebas (independen) yaitu Dana Desa (X1), Penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa (X2), Penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (X3), dan Pendapatan Asli Desa (X4).

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri tahun 2018, yaitu sebanyak 343 Pemerintah desa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu, kriteria yang digunakan dapat berdasarkan judgment atau kuota tertentu (Erlina, 2011).

Tabel 1: Variabel dan Indikator yang digunakan

Nama		Indikator	Satuan
Dana Desa	X1	Pagu Dana Desa	Rupiah
DD Pembangunan	X2	Realisasi penggunaan Pembangunan	Rupiah

DD Pemberdayaan	X3	Realisasi penggunaan pemberdayaan	Rupiah
PADes	X4	PADes	Rupiah

Analisis Regresi Logistik

Regresi Logistik merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel peubah (dependent or response) yang memiliki dua atau lebih kategori (biner atau dikotomi) dengan satu atau lebih variabel independen (predictor or explanatory) berskala kategori atau interval (Hosmer, 2000). Agresti (2007) menjelaskan regresi logistik merupakan regresi non linier yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y yang bersifat tidak linear, ketidaknormalan sebaran Y, keragaman respon tidak konstan yang tidak dijelaskan dengan model regresi linear biasa.

Penelitian ini menggunakan dua kriteria tingkat kemiskinan, yaitu kriteria yang menyatakan tingkat kemiskinan tinggi dan kriteria yang menyatakan tingkat kemiskinan rendah dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

No	Rentang Norma	Kategori	Rentang
1	$X \geq 40\%$	Tinggi	1
2	$X < 40\%$	Rendah	0

Model regresi logistik yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

β_0 = Konstanta

β_1 – β_6 = Koefisien Variabel

e = error

D. HASIL PENELITIAN

Hasil Pengumpulan Data

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 343 desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang sudah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memperoleh sampel akhir sebanyak 298 desa dengan proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

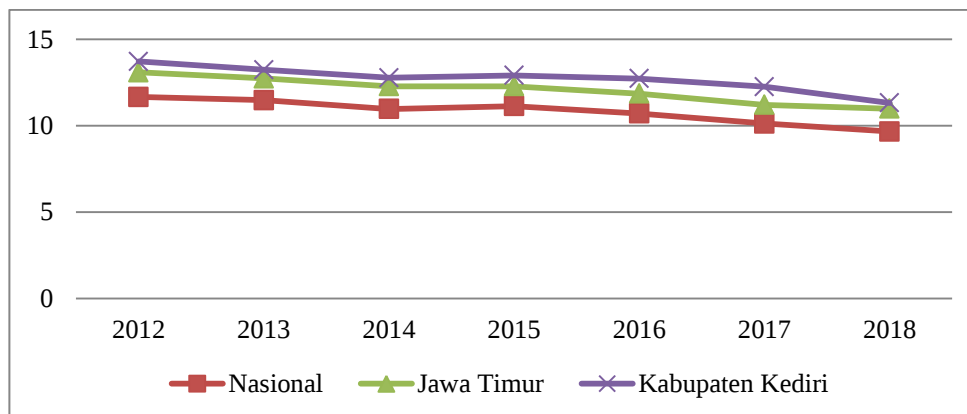
Tabel 1 : Proses Pengambilan Sampel

- Jumlah Seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018	343
- Pemerintah Desa yang tidak melapor Laporan Aktivitas tahunan selama periode 2018 dengan lengkap di website Data Pokok Profil Desa dan Kelurahan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri	(12)
- Pemerintah Desa dengan data tidak lengkap	(34)
Jumlah Pemerintah Desa dengan data lengkap	298
Jumlah Sampel akhir dalam penelitian	298

Kemiskinan di Kabupaten Kediri

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS adalah data makro yang didapat dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selama kurun waktu 2012-2018 kemiskinan Kabupaten Kediri mengalami penurunan angka dari 13,71% menjadi 11,31%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kediri menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

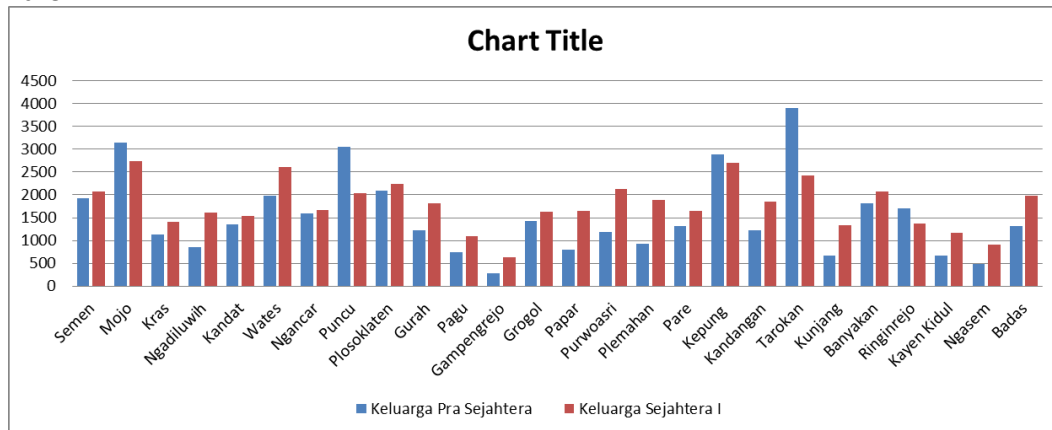
Gambar 1 : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri Tahun 2012-2018



Sumber : BPS, diolah (2019)

Kondisi jumlah keluarga miskin di Desa Kabupaten Kediri tahun 2018 berdasarkan data BDT menunjukkan bahwa Kecamatan Tarokan dan Kecamatan Mojo merupakan daerah dengan jumlah keluarga miskin paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Sejumlah 6.315 kepala keluarga (KK) tergolong miskin di Kecamatan Tarokan dan sebanyak 5.884 Kepala Keluarga (KK) tergolong miskin di Kecamatan Mojo. Kondisi jumlah keluarga miskin di Desa Kabupaten Kediri yang dirinci setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2 : Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I per Kecamatan Tahun 2018

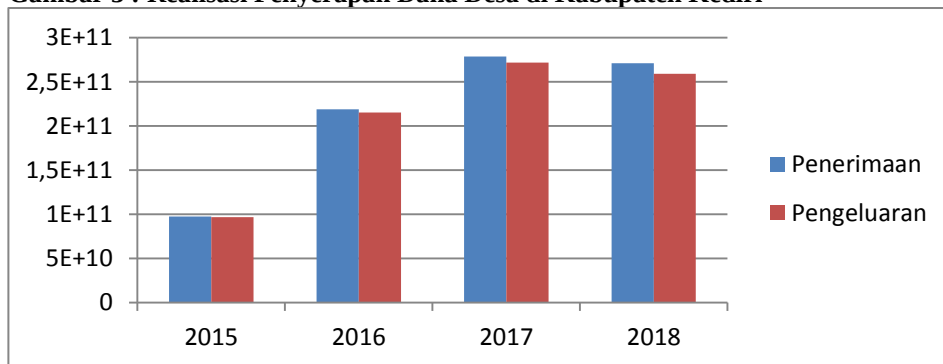


Sumber : Dinas Sosial, diolah (2019)

Dana Desa di Kabupaten Kediri

Tahun 2015 Kabupaten Kediri mendapatkan Pagu Dana Desa sebanyak RP 97.418 474.000 dan terealisasi sebesar 99%. Kemudian pada 2016 Pagu Dana Desa Kabupaten sebanyak Rp 218.640.097.000 dan terealisasi sebesar 98%, tahun 2017 Dana Desa terealisasi sebesar 97% dari Pagu sebanyak Rp 278.633.039.000, dan tahun 2018 sebesar 96% dari Pagu Dana Desa sebanyak Rp 270.691.907.000. Desa yang mendapatkan Dana Desa tahun anggaran 2018 terbanyak di Kabupaten Kediri adalah Desa Tarokan sejumlah Rp 1.504.016.000 dengan 100 persen realisasinya, kemudian Desa Tiron dengan tingkat realisasi 93,47 persen mendapat Dana Desa sejumlah Rp 1.266.551. Sedangkan Desa yang menerima Dana Desa paling sedikit adalah Desa Wonoasri sebesar Rp 650.121.000 dengan realisasi 100 persen dan Desa Kerkep dengan tingkat realisasinya 92,85 persen mendapat Dana Desa sejumlah Rp 663.872.000.

Gambar 3 : Realisasi Penyerapan Dana Desa di Kabupaten Kediri



Sumber : DPMPD, diolah (2019)

Pendapatan Asli Desa

PAD Desa di Kabupaten Kediri yang tertinggi adalah PADes Desa Ngampel Kecamatan Papar, yaitu sebesar Rp 1.579.473.000 dan Desa Sumberagung Kecamatan Wates sebesar Rp1.303.210.845. Sedangkan PADes terendah adalah PADes Desa Kambingan Kecamatan Pagu, yaitu sebesar Rp 977.500 dan Desa Cerme Kecamatan Grogol sebesar Rp 8.500.000. Dari Data yang diakses pada

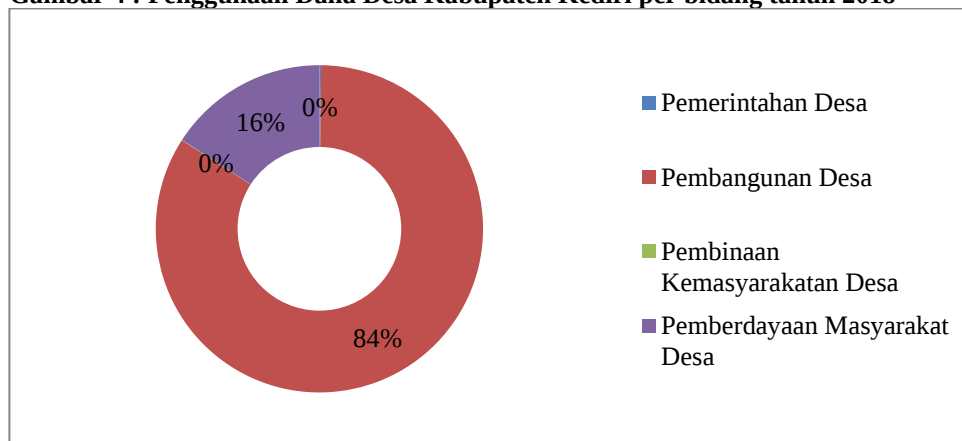
website Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan (Prodeskel) yang digunakan sebagai sampel, terdapat 15 desa yang tidak memiliki PAD Desa atau PAD Desa sama dengan nol dari 343 desa di Kabupaten Kediri.

Desa-desanya tersebut ialah Desa Ponggok dan Desa Keniten di Kecamatan Mojo; Desa Purwodadi Kecamatan Kras; Desa Sumberejo dan Desa Pule di Kecamatan Kandat; Desa Ngancar di Kecamatan Ngancar; Desa Panjer dan Desa Ploso Kidul di Kecamatan Plosoklaten; Desa Besowo di Kecamatan Kepung; Desa Kemiri di Kecamatan Kandangan; Desa Krecek di Kecamatan Badas; Desa Mojokerep di Kecamatan Plemahan; Desa Puhjajar di Kecamatan Papar; dan Desa Ngasem di Kecamatan Ngasem

Deskripsi Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pagu Dana Desa di Kabupaten Kediri tahun 2018 adalah sebesar Rp 270.691.907.000, alokasi penggunaan dana desa pada bidang pemerintah adalah Rp 433.758.000; pada bidang pembangunan desa ialah Rp 216.894.743.253; di bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 84.423.750 dan di bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar Rp40.977.690.862. Realisasi dari penggunaan Dana Desa dapat diilustrasikan seperti gambar berikut :

Gambar 4 : Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kediri per bidang tahun 2018



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri (2018)

Pembahasan Hasil Penelitian

Variabel pada penelitian ini menggunakan Dana Desa (X1), Pendapatan Asli Desa (X2), Penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa (X3), Penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (X4), dan Jumlah Penduduk (X5) dimana variabel ini sebagai variabel independen untuk menguji tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Kediri (Y).

Tabel 4 : Hasil Regresi Logistik

Jumlah Observasi	298
------------------	-----

LR chi2 (4)	107.83		
Prob>chi2	0.0000		
Pseudo R2	0.2806		
Log Likelihood	-138.20488		
Variabel	Koefisien	Z	P>z
X1	1.47e-08	5.05	0.000
X2	-2.98e-09	-1.28	0.201
X3	1.34e-09	0.38	0.704
X4	-2.19e-09	-3.32	0.001
Constanta	-9.819466	-6.94	0.000

Dari hasil uji signifikansi secara keseluruhan, uji signifikansi secara individual, uji kecocokan model didapatkan sebuah model regresi logistik sebagai berikut :

$$\ln p/(1-p) = -9.819466 + 1.47e-08(X1) - 2.98e-09(X2) + 1.34e-09(X3) - 2.19e-09(X4)$$

Dimana :

X1 : Pagu Dana Desa

X2 : Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa

X3 : Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Desa

X4 : Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berdasarkan hasil analisa didapati bahwa yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa adalah variabel Pagu Dana Desa dengan p-value sebesar 0,000 dan variabel PADes dengan p-value 0,001. Variabel Dana Desa memiliki nilai z yang paling besar jika dibandingkan dengan variabel lain, yaitu sebesar 5,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh paling besar dibanding variabel lainnya terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Dari nilai Pseudo R2 sebesar 0,2806 menunjukkan bahwa pengaruh 4 variabel yang masuk dalam persamaan model regresi logistik terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri sebesar 28,06%. Slope negatif pada nilai koefisien menunjukkan bahwa peningkatan variabel independen akan

mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, slope positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel independen akan meningkatkan kemungkinan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Variabel Dana Desa signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri dilihat dari nilai $P > z$ nya yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Artinya Dana Desa membawa pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan desa. Arah pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan desa dapat dijelaskan bahwa semakin banyak Dana Desa yang didapat suatu daerah akan menaikkan kemungkinan tingkat kemiskinan daerah tersebut tinggi.

Kemudian variabel Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa berpengaruh negatif dengan nilai signifikansinya sebesar 0,201 ($> 0,05$). Artinya variabel ini tidak signifikan membawa pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan desa. Arah pengaruh Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dapat dijelaskan bahwa semakin banyak penggunaan Dana Desa di bidang ini akan mengurangi kemungkinan tingkat kemiskinan daerah tersebut tinggi.

Sedangkan variabel Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berpengaruh positif dengan nilai signifikansinya sebesar 0,704 ($> 0,05$). Arah pengaruh Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dijelaskan bahwa semakin banyak penggunaan Dana Desa di bidang ini akan menaikkan kemungkinan tingkat kemiskinan daerah tersebut tinggi. Namun secara statistik variabel ini tidak signifikan sehingga tidak membawa pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan desa.

Variabel PADes berpengaruh signifikan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kediri. Variabel ini berpengaruh negatif dengan nilai signifikansinya sebesar 0,001 ($< 0,05$). Artinya PADes membawa pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan desa. Arah pengaruh PADes terhadap tingkat kemiskinan desa dapat dijelaskan bahwa semakin banyak PADes yang dimiliki suatu daerah akan menurunkan kemungkinan tingkat kemiskinan daerah tersebut tinggi.

E. DISKUSI

1) Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri

Variabel Dana Desa memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Hal ini sama halnya dengan hasil penelitian Nihlam Inda Susilowati, Dwi Susilowati (2017) yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memberikan indikasi bahwa setiap penambahan 1 persen Dana Desa akan meningkatkan kemiskinan Kabupaten/Kota sebesar 2,87%. Susilowati juga menambahkan bahwa Dana Desa masih tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal itu dikarenakan dalam penggunaannya masih didominasi untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelolaan, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya.

Adanya desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggungjawab yang menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Hal tersebut meliputi mengurus urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan, dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah dalam hal ini dianggap lebih mampu mengerti dan memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan. Bantuan Dana Desa diberikan kepada pemerintah desa untuk dikelola merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal. Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa didalam APBN yang ditransfer melalui APBD.

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Indonesia dialokasikan secara merata dan berkeadilan, kemudian pengalokasian Alokasi Dana Desa pun juga diterima masing-masing desa dengan merata dan adil. Pembagian Dana Desa dilakukan berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa di Indonesia. Oleh karena itulah semakin banyak Dana Desa yang diperoleh suatu desa menaikkan peluang desa dengan kemungkinan tingkat kemiskinan pada desa tersebut lebih tinggi.

Berdasarkan pada teori lingkaran kemiskinan, salah satu jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah menaikkan investasi dengan cara memperbaiki pembentukan modal. Pembentukan modal dapat dilakukan melalui investasi modal fisik dan investasi modal manusia. Investasi modal fisik adalah semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru atau meningkatkan stok barang modal (Mankiw, 2000). Sedangkan investasi modal manusia (human capital investment) dapat berupa nilai-nilai pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan.

Pemberian bantuan Dana Desa merupakan bentuk stimulasi untuk menaikkan investasi dalam upaya meningkatkan pembentukan modal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah, maka semakin banyak bantuan Dana Desa yang diberikan. Dana Desa diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan dapat mendanai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik. Kemudian proses pembentukan modal manusia ialah melalui pemberian input efektif nilai-nilai pendidikan, kesehatan dan moral kepada sumber daya manusia.

2) Pengaruh Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri

Penggunaan Dana Desa di bidang ini digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang terkait dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Contoh program atau kegiatannya adalah pelestarian lingkungan hidup; pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Desa yang meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

Tim LPEM-PSEKP-PSP yang menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Friawan dalam Wibowo (2014) menjelaskan bahwa infrastruktur sangat penting dalam integrasi ekonomi yaitu : pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemicu pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah. Dengan membaiknya infrastruktur diharapkan akan memperlancar mobilitas kerja ekonomi antar daerah yang selanjutnya menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, artinya akan menciptakan kesempatan kerja baru karena munculnya unit-unit kegiatan baru. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kondisi pembangunan. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan. Menunjukkan bahwa kemungkinan suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan tinggi akan menurun ketika penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa tinggi. Arah negatif dari pengaruh penggunaan Dana Desa di bidang ini dengan tingkat kemiskinan menunjukkan kurang efektifnya pemanfaatan Dana Desa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa masih tetap tinggi meskipun desa tersebut tidak berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Tidak signifikkannya penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri terjadi karena masih kurang efektifnya penggunaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan penggunaan Dana

Desa oleh pemerintah desa lebih terfokus pada pelaksanaan pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah desa cenderung kurang tepat sasaran dan menyebabkan tidak efektifnya penggunaan Dana Desa

3) Pengaruh Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam hal wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa, dan dibentuknya badan usaha milik desa oleh pemerintah desa adalah salah satu bentuknya. Bumdes dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendayagunakan semua potensi seperti ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sehingga diharapkan melalui bumdes ini dapat menjadi suatu jalan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi desa. Namun, di kabupaten Kediri sendiri baru sekitar 53% desa yang memiliki bumdes dan masih belum semua bumdes berfungsi serta berjalan dengan efektif. Penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap kemiskinan. Menunjukkan bahwa kemungkinan suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan tinggi akan meningkat ketika penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa tinggi. Penggunaan dana desa di bidang ini masih sangat sedikit dilakukan oleh pemerintah-pemerintah desa di kabupaten Kediri, yaitu hanya sekitar 16 persen.

Berdasarkan pada teori lingkaran kemiskinan, salah satu jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah menaikkan investasi dengan cara memperbaiki pembentukan modal yang dapat dilakukan melalui investasi modal fisik dan investasi modal manusia. Modal manusia merupakan suatu bentuk investasi pada seseorang untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan dirinya. Peningkatan mutu modal manusia merupakan usaha untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang. Melakukan pembangunan saja tidak cukup untuk dapat merasakan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dibutuhkan pula masyarakat yang siap mengimbangi pembangunan desa yang terus menerus dilakukan. Maka dari itu penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat perlu mengimbangi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

4) Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri

Hasil penelitian mendapatkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Artinya PADes memiliki kemungkinan menurunkan peluang desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu desa semakin mandiri pula desa tersebut dalam perekonomiannya, sehingga tingkat kemiskinan desa pun akan lebih rendah.

Hal ini sama dengan hasil penelitian dari Astuti (2013) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen. Artinya bahwa ketika terjadi penambahan dana PADes sebesar 1 persen maka akan terjadi penurunan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebesar 0,0225 persen. Begitu pula hasil penelitian dari Nugraheni, Ananda, Syafitri (2018) yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah PAD memiliki kemungkinan menurunkan peluang desa dengan kemiskinan tinggi sebesar $-5,27 \times 10^{-10}$

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum Dana Desa dan PADes berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Arah pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan adalah positif yang artinya ketika Pagu Dana Desa yang diterima lebih banyak, maka kemungkinan suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan tinggi akan

meningkat. Pembagian Dana Desa dilakukan secara merata dan adil serta proporsional. Sehingga, semakin banyak Dana Desa yang diterima suatu daerah dikarenakan kondisi ekonomi dan sosial yang membutuhkan lebih banyak bantuan dana desa. Sedangkan arah pengaruh PADes adalah negatif yang artinya ketika PADes suatu desa tinggi maka kemungkinan akan menurunkan peluang desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu desa semakin mandiri pula desa tersebut dalam perekonomiannya, sehingga tingkat kemiskinan desa pun akan lebih rendah.

Penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak signifikan berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa masih tidak tepat sasaran dan kurang efektifnya penggunaan Dana Desa di kedua bidang tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa yang masih tetap tinggi meskipun desa tersebut tidak berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Mengingat pemerintah desa masih mendominasi penggunaan Dana Desa secara keseluruhan pada bidang Pembangunan Desa. Padahal melakukan pembangunan saja tidak cukup untuk dapat merasakan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dibutuhkan pula masyarakat yang siap mengimbangi pembangunan desa yang terus menerus dilakukan. Maka dari itu penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat perlu mengimbangi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa Dana Desa menyumbang pengaruh yang paling besar diantara variabel lainnya terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat mengelola Dana Desa yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dan digunakan dengan efektif.

Perlu diperhatikan kembali bahwa dalam pembangunan ekonomi, melakukan pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Perlu diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengambil kesempatan yang ada dari fasilitas infrastruktur yang telah dibangun. Maka dari itu perlu diperkuatnya kapasitas perangkat desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan dana desa agar lebih optimal, efektif dan akuntabel. Agar Dana Desa tidak lagi hanya didominasi pada bidang pembangunan desa saja dan dapat mulai menggunakannya di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Terlebih pada menghidupkan BUMDes yang dapat membantu perekonomian Desa menjadi lebih mandiri serta meruapakan suatu bentuk dalam memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam meningkatkan perekonomian

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). *TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)*. 61–76.
- Aghnia, N. L. (2018). Pengaruh Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Institut Pertanian Bogor). Retrieved from <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA/INBAHASAEXTN/0,,contentMDK:22487425~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:447244,00.html?cid=EXTEAPIDs1-Bah>
- Agresti, A. (2007). An introduction to categorical data analysis. In *Statistics in Medicine* (2nd ed., Vol. 28). <https://doi.org/10.1002/sim.3564>
- Agusta, I. (2014). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan* (Fujiartanto, Ed.). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Astuti, P. B., & Astuti, P. B. (2013). Efektivitas Dan Pengaruh Pnpm Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskindi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2). Retrieved from <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/1>
- Atmaja HK, M. K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

- Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4).
- BPS. (2018). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. Jakarta.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan usaha 2013-2017*. Jakarta.
- Cahyat, A. (1987). Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia. *Statistics*, 1–8.
- Davis, E. P., & Sanchez-martinez, M. (2014). *A review of the economic theories of poverty*. London.
- Dewi, Ratna Sari dan Irama, O. N. (2018). PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(November), 11–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jab.v4i2.1513>
- DinasSosial. (2018). *Data BDT*. Kediri.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2019). *Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019*. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>
- DPMPD. (2018). *Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Kediri tahun 2018*. Kediri.
- Haeruman. (1997). KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA UNTUK MENGATASI KEMISKINAN. *Bappenas*.
- Hardijono, R. (2013). *Kemandirian Ekonomi Desa melalui Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Hosmer, D. W. & Stanley L. (2000). Introduction to the Logistic Regression Model. In *Applied Logistic Regression* (2nd ed., pp. 1–30). <https://doi.org/10.1002/9781118548387.ch1>
- Hughes, R. (2015). *Empowering Rural Families and Communities* *. 36(4), 396–401. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/584490>
- Jhingan, M. L. (1992). *Perencanaan, Ekonomi Pembangunan dan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khusaini, M. dan A. E. Y. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah* (A. E. Yustika, Ed.). Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). *GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD*. 18(04), 62–72.
- Lin, J. Y. (2012). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China* *. 49(1), 1–21.
- Manjoro, A. E. (2017). *Theories of Poverty Reduction as They Apply to the Gorongosa - Case Study in Alleviating Poverty Through Local Resources and Initiatives*.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makroekonomi* (Edisi Keem). Jakarta: Erlangga.
- Nihlam Inda Susilowati, Dwi Susilowati, S. H. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ilmu Ekonomi*, 1(Alokasi, Pengaruh Desa, Dana Desa, Dana Produk, D A N Regional, Domestik Kemiskinan, Terhadap Kota, Kabupaten Timur, D I Jawa), 514–526.
- Nugraheni, R. S., Ananda, C. F., & Syafitri, W. (2018). *ANALISIS DAMPAK ALOKASI ANGGARAN DESA DAN INFRASTRUKTUR DESA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI*. 18(2).
- Nugroho, T. dan A. S. (2008). *Paradigma Model Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Lembaga Penerbita & Dokumentasi FIA-UB.
- Permana, A. Y. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Universitas Diponegoro.
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan. *Socius*, XIV(Oktober-Desember), 56–63.
- Sari, I. M. dan M. F. A. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15, 34.
- Setianingsih, I. (2017). KONTRIBUSI DANA DESA DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MELAWI Irma Setianingsih. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5 no 3, 1–18. Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/21437>
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota*

- Provinsi Jawa Tengah*) (Universitas Diponegoro). Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/44748/1/04_WIBOWO.pdf
- Widjaja, H. A. . (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Worldbank. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank*, 1(Poverty), 1–402. Retrieved from www.worldbank.org
- Zuhdiyati, N., & David. (2015). KEMISKINAN DI INDONESIA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir*, (Atalay), 27–31.